

Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Berdasarkan Teori Edward III di Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Luwu Utara

Elya Septiani

STISIP Veteran Palopo

E-mail: elyaseptiani1995@gmail.com

Article History:

Received: 30 Juli 2024

Revised: 15 Agustus 2024

Accepted: 17 Agustus 2024

Keywords:

Policy Implementation, Independent Curriculum, Edward III Theory

Abstract: *This research aims to analyze the implementation of the independent curriculum policy based on Edward III's theory at the elementary school level in North Luwu Regency. The research method uses qualitative methods with a phenomenological type. Data collection through observation, interviews and documentation. The technique for collecting informants uses a purposive sampling method, namely; North Luwu Regency Education Office, school principals, teachers and students. The research results based on Edward III's theory are; Communication is carried out by coordinating in the form of outreach activities by the government sector to schools, involving school principals, teachers, students and parents, human resources supported by teachers and school staff, then facility resources supported by the existence of an independent teaching platform, as well as human resources funds obtained from school operational assistance funds (BOS), disposition, demonstrated by conducting teacher training in making independent curriculum teaching modules (prototypes) and KKG activities, bureaucratic structure, direction to school principals and teachers to continue learning and conducting training on the independent platform Study. The conclusion is that the implementation of the independent curriculum has gone well at the elementary school level in North Luwu Regency.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan implementasi kebijakan harus merupakan suatu proses “top down”, hal ini dimaksudkan agar apa yang dilakukan oleh para implementor dalam pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara lebih efektif. Oleh Anderson (1978), bahwa ; “public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”. Maksud dari pernyataan Anderson ini, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan yang berkualitas harus berisikan opini publik sebagai bahan representasi dari kepentingan publik itu sendiri.

Berkaitan dengan kebijakan publik dalam lingkup pendidikan, untuk meningkatkan mutu pendidikan pemerintah pun mencanangkan suatu kebijakan kurikulum merdeka. Keluarnya

kebijakan tersebut terkait dengan proses pembelajaran di masa pandemi covid-19. Hal ini dilakukan demi terpenuhinya hak setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Adanya kebijakan kurikulum merdeka sebagai alat untuk memulihkan pembelajaran di masa pandemi dan pasca pandemi. Acuan dari adanya Kebijakan kurikulum merdeka yakni ; Permendikbudristek No.4 Tahun 2022, Permendikbudristek No.7 Tahun 2022, Kepmendikbudristek No. 56 Tahun 2022, Keputusan Kepala BSKAP No. 008/H/KR/2022 Tahun 2022 dan Keputusan Kepala BSKAP No. 009/H/KR/2022 Tahun 2022.

Penelitian tentang pelaksanaan kurikulum merdeka yang dilakukan oleh Arnes dkk (2023), membahas mengenai analisis mendalam terhadap pemanfaatan platform merdeka mengajar yang kemudian diakselerasikan dengan pelaksanaan kurikulum merdeka. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Alimuddin (2023), yang lebih menekankan pada pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah dasar kemudian menganalisis hambatan serta cara mengatasi hambatan tersebut. Kemudian penelitian dengan tujuan mengumpulkan informasi mengenai langkah-langkah pengembangan kurikulum berdasarkan kerangka kualifikasi Indonesia (KKNI) dan kurikulum merdeka, yang dilakukan oleh Cholilah dkk (2023).

Ketiga penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang mana, pada penelitian ini akan menganalisis secara mendalam pelaksanaan kurikulum merdeka tingkat sekolah dasar dengan menggunakan pendekatan teori Edward III. Karena fokus penelitian ini menggunakan teori Edward III, maka indikator yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik ialah ; komunikasi, sumber daya, disposition dan struktur birokrasi. Selain itu, locus penelitian ini berada di Kabupaten Luwu Utara.

Hadirnya kebijakan kurikulum merdeka yang dapat dikatakan masih baru ini, maka penulis merasa perlu melihat implementasi kebijakan kurikulum merdeka terutama dalam meningkatkan mutu pembelajaran guru. Dalam kurikulum merdeka ini guru sebagai penuntun dalam mengajar, belajar, dan berkarya untuk peserta didiknya. Dikatakan merdeka, karena peserta didik diarahkan memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Selain itu guru pun mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik sedangkan untuk sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas maka penulis dalam karya ilmiah ini lebih memfokuskan pada implementasi kebijakan kurikulum merdeka yang dihubungkan dengan meningkatnya mutu pembelajaran guru yang diberikan kepada peserta didiknya.

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan Publik

Secara sederhana kita dapat menafsirkan implementasi kebijakan sebagai proses pelaksanaan kebijakan setelah melalui tahap perumusan kebijakan. Pembahasan mengenai implementasi kebijakan publik telah menjadi perhatian para ahli ilmu social terutama bidang ilmu politik dan administrasi publik, ini terjadi baik di Negara maju maupun berkembang. Secara umum pemahaman implementasi kebijakan oleh Grindle (1970) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses dari implementasi baru akan dimulai jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan pun telah tersusun serta dana pun telah dipersiapkan dan disalurkan dalam mencapai sasaran kebijakan (Akib,2010).

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Lane (Akib,2010) tentang konsep implementasi bahwa implementasi adalah sebuah konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi

merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan pendeskripsian tersebut dapat dijabarkan formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasilnya sebagai produk serta hasil dari akibat. Implementasi kebijakan juga menghubungkan antara tujuan kebijakan serta terealisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980) bahwa dalam implementasi tugasnya adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik terealisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak kepentingan.

Diketahui bersama seyogyanya implementasi kebijakan itu sendiri merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan (*policy making process*), sesuai dengan yang dinyatakan oleh Hasbullah (Yuliah,2020) bahwa proses dari pembuatan kebijakan merupakan bagian dari proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik. Hal ini didukung oleh pendapat Dunn (2003) secara rinci menjabarkan fase-fase dalam pembuatan kebijakan tersebut, pada fase pertama adalah tahap penyusunan agenda, fase kedua adalah tahapan formulasi kebijakan, pada fase ketiga adalah tahap adopsi kebijakan, difase keempat adalah tahap implementasi kebijakan dan difase terakhir ialah tahap penilaian kebijaka. Dari uraian tersebut menggambarkan implementasi kebijakan bagian dari proses perumusan kebijakan yang saling berkesinambungan tidak dapat terpisahkan.

Sepanjang perjalanannya telah dirumuskan beberapa model implementasi kebijakan. Salah satunya yang dikembangkan oleh George Edward III (1980). Berdasarkan pemikiran Edward III dalam kerangka pemikiran bahwa keberhasilan implementasi kebijakan public dipengaruhi oleh faktor-faktor; 1) *communication*, 2) *resources*, 3) *dispositions*, dan 4) *bureaucratic structure*

Berkaitan dengan implementasi yang mengarah pada hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan. Pressman dan Wildavsky (1978) menerangkan bahwa “implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete, maksud dari pernyataan ini ialah, membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Dari pengertian kebijakan public dan implementasi maka diperoleh gambaran bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu proses kegiatan administrative yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui.

Kurikulum Merdeka

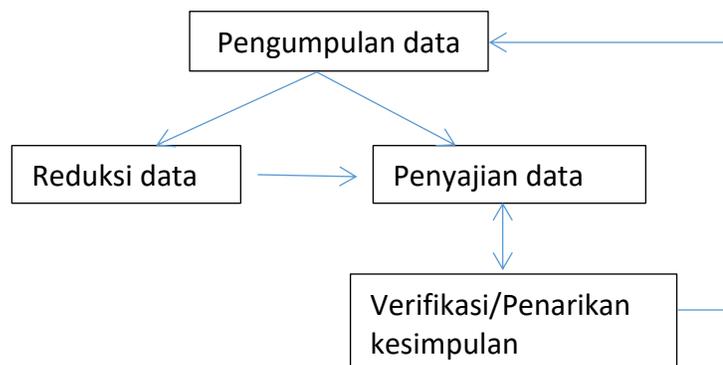
Implementasi kurikulum merdeka berdasarkan atas kebijakan-kebijakan berikut ; Permendikbudristek No.4 Tahun 2022, Permendikbudristek No.7 Tahun 2022, Kepmendikbudristek No. 56 Tahun 2022, Keputusan Kepala BSKAP No. 008/H/KR/2022 Tahun 2022 dan Keputusan Kepala BSKAP No. 009/H/KR/2022 Tahun 2022. Berdasarkan pada kebijakan tersebut, kurikulum merdeka dibuat lebih sederhana dan mendalam. Pada kurikulum merdeka focus materi lebih esensial dengan mengikuti pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Sehingga pembelajaran yang diberikan ke peserta didik lebih mendalam, bermakna, menyenangkan dan tidak terburu-buru (Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi). Dikatakan merdeka, karena peserta didik diberikan ruang untuk memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasinya. Kemudian bagi guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Pada sekolah diberikan wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.

Keunggulan berikutnya pada kurikulum merdeka yakni lebih relevan dan interaktif. Hal ini disebabkan pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya ; isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya demi mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi). Berdasarkan hal tersebut maka

dibuatlah platform Merdeka Mengajar sebagai sarana edukasi yang diperuntukan menjadi teman penggerak guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui interview dengan informan dan dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan informan menggunakan metode purposive sampling yang sejak awal informan ditentukan sesuai dengan topik penelitian juga menggunakan teknik snowball yang mana informan penelitian akan bertambah tanpa diduga selama proses penelitian. Kemudian data yang telah dikumpulkan dalam bentuk matriks hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang selanjutnya dianalisis dengan metode miles dan huberman (1992) yakni teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 1. Berdasarkan Teknik Analisis Data (Miles Dan Huberman,1992)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik tingkat pusat dan daerah dapat berjalan, maka diperlukan perhatian dalam implementasinya. Salah satunya yang dikaji penulis tentang implementasi kebijakan kurikulum merdeka. Berdasarkan yang dikatakan oleh Edward III dalam Mustari (2015) perlunya memperhatikan empat isu pokok dalam implementasi yakni *communication, resource, disposition or attitude*, dan *beureucratic structures*. Sehingga jalannya implementasi kebijakan lebih efektif. Penulis pun menjadikan empat isu pokok di atas sebagai acuan pengkajian analisis implementasi kebijakan kurikulum merdeka dalam penelitian ini.

Komunikasi

Proses implementasi kebijakan tidak lepas dari interaksi oleh para pembuat dan pelaksana implementasi kebijakan itu sendiri. Sifat interaksi menurut Dunn (2003) yakni; pemanfaatan informasi dari masalah yang sangat kompleks. Interaksi dalam hal ini berkenaan dengan komunikasi. Merujuk pada hal yang dikatakan oleh Dunn jika dikaitkan dengan penelitian bahwa bukan hanya dalam proses perumusan kebijakan yang memerlukan interaksi tetapi juga dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, dikatakan pula oleh Widodo (2010) suatu kebijakan sebaik apapun, bila tidak dilaksanakan dengan baik dalam implementasinya, maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan bias terwujud. Olehnya itu, dibutuhkan hubungan baik antar instansi dalam implementasinya. Melalui komunikasi, kerjasama dan koordinasi.

Lebih lanjut dikatakan oleh Nurwan (2013), salah satu bentuk komunikasi dalam implementasi kebijakan pendidikan ialah; komunikasi terhadap guru, peserta didik dan orangtua peserta didik. Sehingga melalui hasil penelitian, komunikasi dilakukan dalam bentuk koordinasi oleh sektor pemerintah yakni dinas pendidikan Kabupaten Luwu Utara, melalui kegiatan sosialisasi ke sekolah. Kegiatan sosialisasi tersebut melibatkan pihak sekolah seperti ; kepala sekolah, guru, murid dan orangtua murid. Dengan kegiatan sosialisasi tersebut menjelaskan pentingnya keterlibatan para sektor dalam proses pelaksanaan kurikulum merdeka.

Diharapkan dengan adanya koordinasi dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka menjadi tolak ukur dalam penilaian kebijakan. Juga sebagai bentuk tersalurkannya kebijakan kurikulum merdeka secara merata. Agar dalam prosesnya tidak lagi terjadi kesenjangan dan minim informasi terkait kurikulum merdeka. Sehingga demi terlaksananya kebijakan tersebut maka diperlukan interaksi berkesinambungan antar pihak yang terkait.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Madani (2011), dengan adanya interaksi dalam proses kebijakan oleh institusi pemerintah daerah dan masyarakat, maka melalui interaksi tersebut akan terjalin hubungan kerjasama demi terpenuhinya kepentingan serta kebutuhan masyarakat dalam proses kebijakan publik.

Komunikasi dalam bentuk interaksi selain dilakukan pemerintah dengan metode sosialisasi di sekolah, juga dilakukan antar guru dengan menjalin koordinasi melalui kegiatan KKG disetiap gugusnya. Melalui pemaparan hasil penelitian dia atas telah menggambarkan hubungan komunikasi baik dalam bentuk koordinasi dan interaksi yang dilakukan oleh pemerintah, pihak sekolah dan masyarakat.

Sumber daya

Ketersediaan sumber daya dalam implementasi kebijakan mengarah pada hal-hal penunjang pelaksana implementasi kebijakan. Dikatakan oleh Van Matter dan Van Hon (dalam Setyawan dan Srihardjono, 2016), di dalam suatu implementasi kebijakan diperlukan dukungan sumberdaya diantaranya ; sumberdaya manusia (human resources), sumberdaya material (material resources) dan sumberdaya metode (methode resources), lebih lanjut lagi Dachy dalam Nurwan (2019) pun menerangkan bahwa implementasi suatu kebijakan didukung oleh beberapa sumber daya yang memadai diantaranya ; sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya kewenangan dan sumber daya peralatan. Meskipun dalam konteks bahasa sedikit berbeda, yang diungkapkan oleh kedua ahli di atas mengenai sumber daya akan tetapi memiliki makna yang sama yakni segala aspek yang dapat menjadi penunjang terlaksananya kebijakan publik.

Salah satu sumber daya yang dianggap penting ialah sumber daya manusia. Hal ini berdasarkan yang dikatakan oleh Setyawan,dkk (2016) bahwa sumber daya manusia selain menjadi subyek implementasi kebijakan, juga sebagai objek implementasi kebijakan. Dari hal inilah menggambarkan keistimewaan sumber daya manusia, yang akan menjalankan segala sumber daya pendukungnya.

Implementasi kebijakan kurikulum merdeka di tingkat sekolah dasar di Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Masamba, telah didukung oleh sumberdaya yang cukup memadai. Dalam hal ini, sumberdaya manusia, dana dan fasilitas. Adapun sumber daya manusia di dukung oleh tenaga guru dan staf sekolah. Sedangkan sumberdaya fasilitas didukung dengan adanya platform merdeka mengajar yang dapat dengan mudah diakses melalui smartphone maupun komputer. Platform ini sebagai wadah dan pedoman guru untuk menambah wawasan, belajar dan berbagi hasil karya. Terkait sumberdaya dana diperoleh dari bantuan operasional sekolah (BOS).

Seperti hal nya yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam sulistyadi (2014), implementasi sangat membutuhkan sumber daya. Hal ini menegaskan kedudukan sumber daya

sangat penting bagi terlaksananya suatu kebijakan publik. Sebaik apa pun suatu kebijakan dalam proses formulasinya, namun tidak didukung oleh sumber daya yang memadai dalam implementasinya, maka yang terjadi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal dalam mencapai tujuannya. Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa guru dan sekolah telah siap dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, dengan adanya dukungan sumber daya yang disebutkan di atas sebagai penunjang pelaksanaan implementasi kebijakan kurikulum merdeka.

Disposition

Edward III menerangkan tentang disposition berkaitan dengan kecenderungan dan keinginan pelaku kebijakan untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Selain itu, disposition berkaitan pula dengan para implementor yang tidak hanya memiliki kecakapan saja melainkan memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan (Mustari, 2015). Disposition ini sendiri menggambarkan karakteristik yang ada pada para implementor kebijakan, yang kemudian akan memberi pengaruh pada implementasi kebijakan publik.

Sehingga dapat kita pahami bahwa disposition dalam hal ini adalah keinginan dan kesungguhan yang berkaitan erat dengan komitmen yang dimiliki untuk para pelaku kebijakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam hasil penelitian ditemukan sikap para pelaku kebijakan kurikulum merdeka telah menunjukkan komitmen dalam pengembangan kurikulum merdeka yang diadopsi dari kebijakan sekolah.

Sikap selanjutnya ditunjukkan dengan keberlanjutan program kurikulum merdeka dengan melakukan pelatihan guru dalam pembuatan modul ajar kurikulum merdeka (prototipe), yang dilakukan sekali sebulan serta rutin melakukan kegiatan sosialisasi kurikulum merdeka melalui kegiatan KKG. Sikap keberlanjutan selanjutnya dilakukan dengan pemeliharaan dalam bentuk pengawasan. Semua kegiatan yang dilakukan oleh implementor sangat erat kaitannya terhadap peran guru sebagai pendidik agar lebih optimal dalam pelaksanaan kurikulum merdeka.

Keterkaitan dengan komitmen tersebut berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan kebijakan kurikulum merdeka baik oleh pihak sekolah dan murid juga harus melihat sejauh mana pemerintah daerah turut andil, dalam hal ini adalah Dinas pendidikan Kabupaten Luwu Utara. Yang mana pihak dinas terkait telah menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan kurikulum merdeka dengan melakukan kerjasama dengan semua warga sekolah maupun orang tua murid. Ini ditunjukkan dilakukannya monitoring dan evaluasi setiap bulan oleh pihak dinas terkait dengan melakukan kunjungan ke sekolah. Selain melakukan kunjungan juga melakukan pengawasan melalui media Wahtsapp. Bentuk komitmen lainnya ditunjukkan dengan mengikuti alur dan panduan kurikulum merdeka serta menerapkannya di lingkungan sekolah. Seperti melakukan pelatihan mandiri dari platform merdeka mengajar, yang tujuannya untuk menambah wawasan dan kemampuan kompetensi guru sebagai bagian dari sasaran implementasi kurikulum merdeka yang kemudian dilakukan pengawasan oleh pemerintah.

Struktur Birokrasi

Seperti yang dikatakan oleh Edward dalam Nugroho (2011) bahwa struktur birokrasi mengarah pada kesesuaian organisasi birokrasi sebagai penyelenggara (pegawai/administrator/birokrat) implementasi kebijakan publik. Kesesuaian ini ditandai dengan adanya unsur koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintahan. Stuktur birokrasi pada umumnya berkaitan dengan pembagian wewenang yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan. lebih

lanjut dikatakan oleh Setyawan (2016) struktur birokrasi atau organisasi diartikan sebagai pola hubungan antar kewenangan dan koordinasi, diantara para aktor pelaksana (intansi) yang berhubungan dengan implementor kebijakan.

Hal yang serupa dikatakan oleh Mustari (2015) bahwa di pemerintahan Indonesia pun masih ada inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama. Maka dari itu para aktor pelaksana kebijakan harus mumpuni untuk melakukan koordinasi dengan para implementor kebijakan tersebut. Maka, oleh Edward dalam Mustari (2015) bahwa terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, yakni ; melakukan standar operating procedur (SOP) dan pelaksanaan fragmentasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka para aktor pelaksana kebijakan kurikulum merdeka harus memiliki standar operasional sebagai acuan dalam berkegiatan pelaksanaan kurikulum merdeka yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. berdasarkan hasil penelitian pemerintah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara melakukan pengawasan dalam bentuk asesmen guru, yang mana guru ketika akan melakukan aktivitas pembelajaran harus berpedoman pada standar pada kurikulum merdeka. Standar tersebut terbuat dalam bentuk modul ajar kurikulum merdeka. Di dalam silabus tersebut memuat tentang alur tujuan pembelajaran kurikulum merdeka. Alur tujuan pembelajaran inilah yang kemudian dilakukan setiap harinya oleh guru sekolah dasar dalam pemberian pembelajaran kepada peserta didiknya.

Hasil penelitian tersebut telah menunjukkan hubungan koordinasi dengan sekolah dalam pengimplementasian kebijakan kurikulum merdeka. Kemudian pada fase fragmentasi digambarkan dengan penyebaran tanggung jawab kegiatan/aktivitas para pelaksana kurikulum merdeka. Pada tahap ini sesuai dengan hasil penelitian, Dinas pendidikan Kabupaten Luwu Utara dengan koordinasinya ke sekolah dasar, memberikan arahan kepada kepala sekolah dan guru untuk tetap belajar dan melakukan pelatihan di platform merdeka belajar, dengan tujuan pengembangan kemampuan guru dalam memenuhi tanggung jawab membentuk peserta didik sesuai dengan profil pelajar pancasila dalam implementasi kurikulum merdeka.

Hasilnya pun kini guru sekolah dasar telah memiliki sertifikat dari pelatihan mandiri di platform kurikulum merdeka. Untuk meningkatkan akan kesadaran dan tanggung jawab, maka setiap pekan; pengawas, kepala sekolah dan guru rutin melakukan sosialisasi dan pelatihan secara mandiri di sekolah, serta mengevaluasi hasil pembelajaran yang sesuai standar kurikulum merdeka.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan kurikulum merdeka berdasarkan teori Edward III dengan empat indikator, yang mana indikator komunikasi dilakukan dalam bentuk koordinasi oleh lintas sektor pemerintah. Indikator yang kedua ialah sumberdaya, salah satu yang dianggap penting ialah sumber daya manusia. Implementasi kebijakan kurikulum merdeka di tingkat sekolah dasar Kabupaten Luwu Utara telah didukung sumber daya yang cukup memadai yakni tenaga guru, staf sekolah dan sumberdaya fasilitas dengan adanya platform merdeka mengajar yang dapat diakses melalui smartphone dan komputer. Pada indkator ketiga terkait dengan disposition, dalam hal ini komitmen ditunjukkan dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulannya oleh dinas terkait dengan melakukan kunjungan ke sekolah. Dan indikator terakhir ialah struktur birokrasi, dengan dilakukan koordinasi dan penyebaran tanggung jawab antar pemerintah dan sekolah.

DAFTAR REFERENSI

Alimuddin, Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Jurnal Ilmiah Kontekstual, Vol. 4 No. 02, 2023.

- Arnes, dkk, Analisis Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar Oleh Guru PPKN untuk Akselerasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 5 No.1, 2023.
- Cholilah, dkk, Pengembangan Kurikulum Merdeka dalam Satuan Pendidikan Serta Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Abad 21. *Jurnal Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 1 No.2, 2023.
- Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press
- Madani, Muhlis, 2011. *Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Miles dan Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Press
- Mustari, Nuryanti, 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutikaprio
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Setyawan dan Nanang, Analisis implementasi kebijakan Undang-undang desa dengan model Edward III di desa Landung Sari Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, Vol. 6 No. 2, 2016.
- Tyas Wardani, Nurwan, Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Journal of Education on Social Science*, Vol.3 No. 2, 2019
- Widodo, Joko, 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media